



RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI BIAK

Jalan Majapahit No. 1 Biak, Papua 98117
Telp. (0981) 21847 Fax. (0981) 21958
Email : pnbiak@gmail.com
Website : pn-biak.go.id

**RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI BIAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	75% 75%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	75% 75%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	75% 75% 75%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	1%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	80%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	90%



4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%
5.	Meningkatnya Serapan Anggaran	Persentase Serapan Anggaran yang Meningkat	90%
6.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat/ pelatihan.	90%

Biak, 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK



Helmin A.

HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.
NIP : 19781008 200112 2 002



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	75%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum Papua		Rp 62.376.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum Papua		Rp 62.376.000
	a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	75%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum Papua		Rp 62.376.000
	b. Persentase Perkara Pidana Anak yang	1%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama		Rp 62.376.000

	diselesaikan secara Diversi			diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	wilayah hukum Papua		
	c. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum Papua		Rp 62.376.000
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum Papua		Rp 62.376.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum Papua		Rp 62.376.000
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum		Rp 62.376.000

	Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Papua		
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum Papua		Rp 62.376.000
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	-	-	-	-	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	-	-	-	-	-
	c. Persentase pencari keadilan golongan	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah hukum	312 Jam Layanan	Rp 31.200.000

	tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)				Papua		
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				
5. Meningkatnya Serapan Anggaran	Persentase Serapan Anggaran yang Meningkat	90%	Meningkatnya penyerapan anggaran	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1 Tahun	Rp 4.345.532.000
6. Peningkatan Kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat	90%	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi SDM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1 Tahun	Rp 4.345.532.000



MASTER

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK
NOMOR: W30-U4/29 /SK/1/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI BIAK TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan peradilan dan penyelenggaraan administrasi peradilan baik teknis maupun non teknis guna mencapai hasil maksimal maka sebagai langkah awal perlu dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Biak ;
 - b. Bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 merupakan dasar dan acuan bagi seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Biak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara peradilan ;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ;
 - d. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini kami anggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Biak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. PP NO. 70 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Menpan No. 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU);
 6. PP No. 90 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

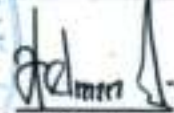
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BIAK TAHUN 2021.**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : W30-U4/228/SK/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020, tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Biak Tahun 2022;
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama – namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Biak;
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 untuk segera menyusun Rencana Kerja tersebut dan mensosialisasikan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : **BIAK**
Pada Tanggal : **6 JANUARI 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK



HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.
NIP. 19781008 200112 2 002



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK
NOMOR: W6-U4/28/SK/1/2021**

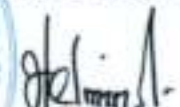
**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI BIAK**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	HELMIN SOMALAY, S.H., M.H. NIP. 19781008 200112 2 002	Ketua Pengadilan Negeri Biak	Pembina
2.	AHAB PALLORA, S.H. NIP. 19691220 199303 1 004	Panitera Pengadilan Negeri Biak	Ketua Tim
3.	HENY SUSILAWATY, S.T. NIP. 19810522 200904 2 010	Sekretaris Pengadilan Negeri Biak	Wakil Ketua Tim
4.	ENDRAWATI L. PASANDE, S.E. NIP. 19820406 200904 2 009	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Bidang Non Teknis
5.	LOD RUMBIK, S.H. NIP. 19610312 199303 1 004	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	ACHMAD ALBASORI, S.H. NIP. 19790620 200912 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	LINDA A.B. LEWERISSA, S.H. NIP. 19880602 200912 2 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	HARUNA SADOLLAH, S.H. NIP. 197701232009042005	Kasubbag Kepegawain, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	DORA RONSUMBRE NIP. 19631013 199303 2 002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : BIAK
Pada Tanggal : 6 JANUARI 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK




HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.
NIP. 19781008 200112 2 002